

Refleksi Pemilu 2024 terhadap Politisasi Agama di Media Sosial Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

**Abdul Hamid¹, Anwar Sanusi², Achmad Lutfi³, Muhamad Sofi
Mubarok⁴, Debi Fajrin Habibi⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ushuluddin dan Adab, IAIN Syekh Nurjati Cirebon

abdulhamid0149@gmail.com¹, anwarsanusiasnaf@gmail.com²,

achmad.lutfi.4u@gmail.com³, sofi.mubarok234@gmail.com⁴,

debi.fajrin@syekhnurjati.ac.id⁵

Abstract

This study aims to discuss the reflection of the 2024 election on the politicization of religion on social media from the perspective of Fazlur Rahman's double movement theory. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The results and discussion of this study indicate that it is necessary to carry out socio-historical contextualization of religion through Fazlur Rahman's double movement theory, which is known for its dual movements, the socio-historical affirmation must be studied as there is still humiliation of a group which ultimately results in divisions between groups. Of course this has to go back to the socio-historical beginning of the verses of the Qur'an which upheld justice. The verses of the Qur'an instruct humans not to generate hate speech against other people. Talking about the politicization of religion, this must be avoided by the public so that they are not easily provoked by politics in the name of religion. Theoretically and practically, this research is expected to have benefits and usefulness implications as an initial study of reflections on the 2024 Election on the politicization of religion on social media from the perspective of Fazlur Rahman's double movement theory. This study recommends government agencies, religious leaders, and the public not to be easily provoked by politics in the name of religion.

Keywords: 2024 Election; Double Movement Theory; Politicization of Religion; Social Media



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas refleksi Pemilu 2024 terhadap politisasi agama di media sosial perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya kontekstualisasi sosio-historis agama melalui teori *double movement* Fazlur Rahman yang dikenal dengan gerakan gandanya, penegasan dari sosio-historis harus dikaji seiring masih terjadinya penghinaan suatu kelompok yang akhirnya mengakibatkan perpecahan antargolongan. Tentu ini harus kembali kepada sosio-historis awal ayat Al-Qur'an diturunkan yang menjunjung tinggi keadilan. Ayat Al-Qur'an memberikan perintah kepada manusia agar tidak menimbulkan ujaran kebencian terhadap orang lain. Berbicara politisasi agama, hal ini harus dihindarkan oleh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi politik yang mengatasnamakan agama. Secara teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai kajian awal tentang refleksi Pemilu 2024 terhadap politisasi agama di media sosial perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini merekomendasikan kepada instansi pemerintahan, tokoh agama, dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi politik yang mengatasnamakan agama.

Kata Kunci: Media Sosial; Pemilu 2024; Politisasi Agama; Teori *Double Movement*.

Pendahuluan

Pemilihan umum 2024 merupakan pesta demokrasi masyarakat yang akan dilakukan untuk menentukan seorang pemimpin negara. Dalam perkembangan sejarahnya, pesta demokrasi ini selalu diwarnai dengan persaingan yang cukup ketat. Indonesia mempunyai masyarakat multikultural dan pluralitas agama yang dipengaruhi oleh keadaan geografis (Nurhayati, 2020). Tidak bisa dipungkiri, para pasangan calon akan memiliki strategi dalam kampanyenya yang salah satunya yaitu kampanye atas nama agama. Tentu ini akan menjadi sasaran para pasangan calon untuk mengambil suara sebanyak-banyaknya. Hal tersebut akan menciptakan sebuah polarisasi yang terkesan negatif dan menimbulkan perpecahan karena adanya perbedaan politik. Realitas yang terjadi di masyarakat cukup memprihatinkan apabila terkena politisasi agama. Masyarakat yang awam akan rasionalitas dan literasi politik, akan



dijadikan target politisasi agama karena cara tersebut relatif praktis, mudah untuk merebut simpati dan emosi masyarakat. Bahkan yang rasionalitasnya baik juga, tetapi awam etika, maka terjadi peluang untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk merebut suara dalam kontestasi politik (Baihaki, 2022).

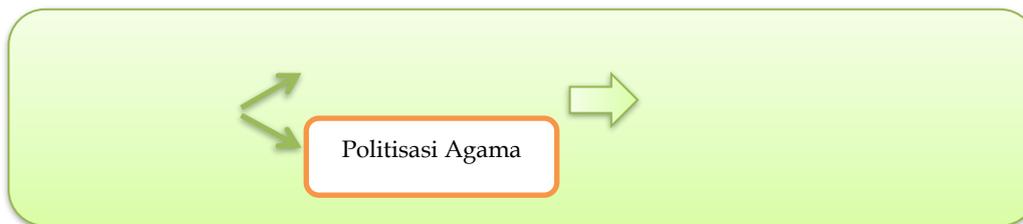
Selanjutnya dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi, masyarakat tidak jauh dari yang namanya media sosial. Segala informasi dan interaksi dilakukan secara *online* dengan menggunakan beberapa platform digital. Namun, berbicara mengenai politisasi narasi agama, menurut riset yang diambil dari dua platform digital yaitu *Youtube* dan *Twitter* dalam kurun waktu dari 2009-2019, terjadi narasi keagamaan yang didominasi oleh konservatisme agama sebanyak 67,2 persen, moderatisme sebanyak 22,2 persen, liberalisme 6,1 persen, dan islamisme 4,5 persen (Ain, 2020). Pemahaman keagamaan yang konservatif merupakan aliran agama dengan ajaran yang telah diwariskan nabi sebagai panduan utama tanpa adanya kontekstualisasi. Data tersebut tentu menjadi motivasi para calon pemimpin untuk memanfaatkan simbol dan identitas keagamaan dalam menduduki jabatan dengan meraup suara mayoritas (Adon, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini perlu dikaji dari permasalahan utama hingga menemukan refleksi dari setiap pesta demokrasi yang sudah terjadi menuju Pemilu 2024. Apalagi di zaman sekarang yang serba digital, kekuatan narasi di media sosial sangat rawan terjadi jika tidak dilakukan dengan literasi keagamaan yang memadai. Kontekstualisasi teks-teks keagamaan dengan perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak terjadi kembali politisasi agama yang merugikan suatu kelompok dan menimbulkan perpecahan agama.

Hasil penelitian terdahulu terkait refleksi Pemilu 2024 telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Antara lain laporan penelitian beberapa tahun lalu yang dilakukan oleh Sujito, Arie (2022), "*Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematikasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024*," Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini telah berusaha mengkaji tentang problematika politik identitas yang sering muncul menuju Pemilu. Hubungan Pancasila dengan demokrasi dan politik identitas dapat memperbaiki pola berpolitik yang baik sebagai warga negara. Akan tetapi, Pancasila dijadikan taruhan elektoral yang membuat keriuhan politik. Gerakan Nasional-Moderat versus gerakan Islamis-Radikal menjadi dua kubu politik identitas yang meluas di atas paradigma liberalisme politik yang tidak berpedoman dengan penghayatan Pancasila sebagai ideologi politik dekolonial. Jalan terbaik mengatasi hal tersebut dengan mengembalikan dimensi emansipatoris Pancasila. Hal ini akan menjadi panduan etis-politis menuju Indonesia emas 2045 (Sujito, 2022).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang memiliki kesamaan sekaligus perbedaan. Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama meneliti Pemilu 2024 dengan politik yang membawa identitas suatu kelompok. Perbedaannya adalah pengambilan refleksi menuju Pemilu 2024 atas politisasi agama di media sosial berdasarkan perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian. Alur logis ini akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu terdapat refleksi Pemilu 2024 terhadap politisasi agama di media sosial perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Untuk memudahkan deskripsi kerangka berpikir, maka disajikan bagan seperti di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Refleksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu gerakan atau kesadaran yang datang dari luar (Setiawan, 2021). Refleksi menjadi sebuah istilah timbulnya suatu kesadaran dari manusia untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi. Menurut Dewey, refleksi memiliki dua jenis, yaitu *intellectual reflection* dan *praxiological reflection* (Simarmata, 2018). Keduanya merupakan bagian dari proses manusia untuk menciptakan kesadaran atas dasar-dasar pengetahuan, kemudian proses transformasi pengetahuan berubah menuju instrument aktivitas. Pada tahun yang akan datang, Indonesia akan dihadapi sebuah demokrasi politik dalam Pemilu 2024. Warga negara akan memilih seorang pemimpin yang diusung oleh berbagai parta politik. Pemilihan umum ini diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 (TB, 2023). Pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan dengan asas yang bersifat Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Selanjutnya, penyelenggaraannya harus berdasarkan prinsip mandiri, berkepastian hukum, jujur, adil, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, profesional, efektif, dan efisien. Politisasi agama merupakan sebuah strategi politik manipulasi mengenai pemahaman

keagamaan melalui cara propaganda, kampanye, dan sosialisasi yang kemudian diinterpretasikan untuk mempengaruhi konsensus keagamaan demi kepentingan suatu kelompok politik (Ronaldo, 2021). Definisi ini secara praktis dilakukan oleh seorang aktor yang menjadikan agama sebagai objek yang dipahami, diidekan, dan digagas dengan disangkutpautkan hal politik (Malik & Batubara, 2014). Tentu hal ini akan menimbulkan keriuhan politik dan akan memicu perpecahan antarumat beragama yang dilatarbelakangi oleh perbedaan politik.

Dalam merefleksikan sebuah problematika, penulis mengkajinya melalui teori *double movement* Fazlur Rahman. Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh inspirasi kontemporer dalam bidang studi Al-Qur'an di Indonesia. Konsep teori *double movement* menjadi sebuah gagasan yang memposisikan Al-Qur'an secara universal dan fleksibel. Secara singkat, *double movement* merupakan sebuah gerakan ganda yang dimulai dari kondisi Al-Qur'an dimasa kini menuju kepada waktu Al-Qur'an diturunkan, kemudian dikembalikan lagi menuju masa sekarang (Syauqi, 2022). Gerakan pertama beranjak dari hal yang bersifat spesifik dalam Al-Qur'an menuju generalisasi prinsip secara universal, sedangkan gerakan kedua dari pandangan umum menuju pandangan yang spesifik yang dikontektualisasi pada zaman sekarang. Hal ini memberikan makna bahwa ketentuan-ketentuan yang bersifat umum lalu diimplementasikan dalam konteks sosio-historis di zaman kini (Rahman, 1982). Jika dikaitkan dengan problematika politisasi agama, tentu akan ditarik benangnya dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian dikontektualisasikan dengan masalah yang terjadi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat refleksi Pemilu 2024 terhadap politisasi agama di media sosial perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Sejalan dengan permasalahan utama, rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana refleksi Pemilu 2024 terhadap politisasi agama di media sosial perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini bertujuan untuk membahas refleksi Pemilu 2024 terhadap politisasi agama di media sosial perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Sebuah penelitian ilmiah lazim memiliki manfaat dan kegunaan, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai kajian awal tentang refleksi Pemilu 2024 terhadap politisasi agama di media sosial perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan untuk memberikan pemahaman tentang refleksi Pemilu 2024 terhadap politisasi agama di media sosial perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman.

Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi lima hal, yaitu pendekatan dan metode, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu serta tempat penelitian (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Darmalaksana, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka-angka statistik. Sumber primer penelitian ini meliputi platform digital di media sosial seperti, *YouTube, Instagram, Facebook, Twitter*, dan sumber literatur lainnya tentang Pemilu 2024, ruang media, dan politisasi agama. Sumber sekunder penelitian ini meliputi rujukan-rujukan yang terkait dengan topik utama yang bersumber dari artikel, buku, dan dokumen hasil penelitian lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi sosial media dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis data (Darmalaksana, 2022). Penelitian ini tanpa menentukan waktu dan tempat karena bukan merupakan penelitian eksperimen, melainkan penelitian pemikiran meskipun data-data diambil dari fakta empiris pada media sosial.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Pemilihan Umum 2014-2019 dalam Bingkai Politisasi Agama

Dalam Piplres 2014, menjadi saksi sejarah mengenai provokasi identitas agama sehingga memicu ketegangan sosial pada masyarakat multikultural dan menimbulkan kelompok gerakan populis Islam yang menggugat dan menentang ekonomi-politik oligarki. Contohnya dalam pernyataan yang dilontarkan Mahfud MD pada pembekalan tim kampanye Prabowo-Hatta Rajasa pada Mei 2014 (Waid, 2014). Mahfud menyampaikan bahwa calon pasangan tersebut jika melihat kelemahan yang lebih sedikit itu ada pada calon pasangannya daripada kubu sebelah yaitu Jokowi-Jusuf Kalla. Lanjut, Mahfud juga menyinggung perihal ajaran fikih Islam. Tentu ini membawa dampak negatif politik di Indonesia, apalagi pernyataannya dalam kapasitas beliau sebagai seorang tokoh agamawan, nasional, dan partai politik. Hal itu memberikan interpretasi bahwa politik kampanyenya menggunakan simbol-simbol agama dalam menggerakkan massa, memperoleh kekuatan di parlemen, dan menyentuh emosi keagamaan untuk kepentingan politik bukan agama.

Pada Pilpres 2019, kontestan para pasangan calon presiden menggandeng seorang tokoh ulama untuk dijadikan bahan kekuatan dalam memenangkan suara. Pembicaraan mengenai ijtimaq pun terjadi. Dalam pertemuan antara politikus dan ulama pada Juli 2018, menghasilkan keputusan rekomendasi ulama pada kubu Prabowo yang muncul sebagai

calon presiden dan calon wakil presiden diisi oleh dua usulan nama yaitu, Abdul Somad Batubara dan Salim Segaf Al-Jufri. Ijtimak ini berdasarkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) dengan pendukung partai politik yaitu, PKS, PAN, Partai Gerindra, Partai Berkarya, dan PBB (Ronaldo, 2021, pp. 45–46). Ijtimak tersebut biasanya dikorelasikan dengan keilmuan dari segi ranah fiqh, Al-Qur'an dan Hadis, dan lainnya untuk mendapatkan legitimasi religius yang kuat. Kelompok GNPF-U sebelumnya hanya mengawasi fatwa MUI dan kemudian lahir untuk merespon terhadap kasus penistaan agama pada diri Basuki Thaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada 2017 (Ayuningtyas, 2018). Isu-isu politik pun bermunculan kepada kelompok ini, hingga pada akhirnya nama yang diterima oleh partai koalisi ialah Sandiaga Uno. Sempat kubu tersebut merekomendasikan alternatif ulama lainnya yaitu, Arifin Ilham dan Aa Gym. Namun, keduanya pun tidak terwujud. Di sisi lain, pihak Jokowi sebagai calon presiden berhasil menggandeng seorang tokoh ulama yang kharismatik yaitu KH. Ma'ruf Amin (Kuwado & Farisa, 2018). Dalam temuan Pilpes 2019, tentu ini bukti bahwa fenomena politisasi agama terjadi saat awal penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, dan menimbulkan politik identitas kebencian atas nama agama.

2. Paradigma Media Sosial dan Politik Identitas

Media sosial merupakan tempat yang mudah untuk mempengaruhi emosional masyarakat menjadi ramai dan panas. Menurut Presiden Jokowi, kerawanan dalam Pemilu 2024 harus dicermati dari unsur hoaks, politik identitas, dan politik SARA (Gayati, 2022). Polarisasi masyarakat dalam politik identitas menjadi hal yang berbahaya dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena masyarakat akan mudah mendiskreditkan kelompok yang berbeda dengannya. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dalam *Launching Press Conference Religion Forum (R20) International Summit of Religious Leaders* di Ritz Carlton menyampaikan larangan menjadi kelompok identitas yang diharamkan Al-Qur'an (Oktaviani, 2022).

Dinamika sosial politik berkembang seiring perkembangan informasi yang pesat di media sosial. Media sosial menjadi bentuk jurnalisme masyarakat yang keberadaannya rawan disalahgunakan dalam penyebaran informasi bohong dan provokasi kebencian yang tidak terverifikasi dengan baik. Pada era pasca-kebenaran, media sosial mampu mempengaruhi emosi masyarakat dan dapat mengalahkan objektivitas dan rasionalitas. Sehingga politik identitas masuk dengan mudah membawa kepentingan politiknya untuk memainkan emosi kepada sasaran kelompok SARA guna menindas sesuatu kebenaran versi masing-masing. Faktanya, tercatat data menunjukkan 132 juta pengguna *Facebook*, 50 juta pengguna

Twitter, dan 45 juta pengguna *Instagram* yang menjadi tempat untuk mengembangkan kampanye jahat, fitnah, hoaks, dan politik SARA (Yuliani, 2017). Paradigma narasi media sosial dalam politik identitas menjadi suatu realitas yang tidak bisa dihindarkan karena berbau diskriminasi, adu domba, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang harus dicermati dengan kritis dan terverifikasi fakta.

3. Interpretasi Narasi Politisasi Agama Perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman

Teori *Double Movement* Fazlur Rahman memberikan mekanisme penafsiran Al-Qur'an dengan dua gerakan. Gerakan pertama, ialah dengan memecahkan masalah yang terjadi di situasi sekarang, kemudian penafsir harus memahami arti makna dari satu ayat dengan meneliti masalah historis ayat Al-Qur'an yang menjadi jawabannya. Gerakan kedua, yaitu dengan menggeneralisasikan jawaban-jawaban tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum, yang disaring atas ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji dalam latar belakang historis dan rasional-logis yang sering diungkapkan (Digarizki, 2021).

Contohnya dalam menafsirkan QS. an-Nahl ayat 90 tentang perintah berbuat adil kepada semua orang dan QS. an-Nisa ayat 8 mengenai perintah berbuat adil. Kedua ayat tersebut memberikan arti bahwa Allah melarang umat-Nya melakukan ujaran kebencian kepada kelompok lain, hingga jangan sampai ketidakadilan itu diperbuat karena tidak suka kepada orang lain. Jadi yang diinginkan Al-Qur'an adalah mengangkat derajat manusia dan tidak menginginkan ketidakadilan dalam memandang manusia berdasarkan nasab, warna kulit, bentuk fisik, suku, kelompok, dan agama.

Pada teori yang ditawarkan Fazlur Rahman, bisa dilihat dari aspek permasalahan sekarang yang terjadi yaitu politisasi agama. Dalam praktiknya, politisasi agama memberikan fenomena perpecahan antarkelompok yang mengatasnamakan agama. Diskriminasi pun terjadi hingga memunculkan *statement* kebenaran masing-masing setelah mendapat provokasi atas politisasi agama. Hal ini terjadi berulang kali dalam setiap pesta demokrasi untuk memperoleh suara mayoritas. Dalam masa pewahyuan Al-Qur'an menceritakan perlakuan diskriminasi terhadap perbedaan SARA yang terjadi oleh sahabat Bilal bin Rabbah. Dia merupakan seorang budak berkulit hitam yang diperlakukan seperti benda yang tidak berharga, yang mudah untuk diperjualbelikan, bahkan diperintah semaunya. Kemudian di riwayat lainnya oleh Abu Daud, sahabat Abu Hindin yang ingin dinikahkan oleh gadis yang berasal dari Bani Bayadha. Lalu Bani Bayadha menolaknya karena sahabat tersebut

berasal dari kalangan budak. Tentu ini memberikan penegasan bahwa Bani Bayadah tidak mau menikahkan gadisnya karena melihat kedudukan dari Abu Hindin.

Jika melihat jawaban-jawaban di atas, ini sebuah penegasan bahwa masih sering terjadi penghinaan suatu kelompok yang akhirnya mengakibatkan perpecahan antargolongan. Tentu ini harus kembali kepada sosio-historis awal ayat Al-Qur'an diturunkan yang menjunjung tinggi keadilan. Kedua ayat di atas, memberikan perintah kepada manusia agar tidak menimbulkan ujaran kebencian terhadap orang lain. Berbicara politisasi agama, hal ini harus dihindarkan oleh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi politik yang mengatasnamakan agama. Dampak dari politisasi agama ini akan memunculkan kesenjangan sosial dan politik. Apalagi di media sosial yang rawan terkena informasi. Masyarakat harus pintar-pintar dalam memilih informasi dengan tepat dan perbanyak literatur politik agama yang memadai.

Selaras dengan itu, dalam penafsiran ayat Al-Qur'an di media sosial oleh Nadirsyah Hosen pun menjelaskan bahwa perlu adanya literatur yang kredibel dan ayat Al-Qur'an untuk dipahami secara kontekstual dengan tepat. Semisal dalam menyikapi pelabelan pemimpin kafir, ayat yang belum dipolitikasi tidak bisa dijadikan alasan untuk memilih pemimpin non Islam walaupun Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada non Islam (Juwantara et al., 2020).

4. Refleksi terhadap Politisasi Agama Berbasis Media Sosial di Pemilu 2024

Agama memiliki kaitan yang kuat dalam keimanan, ketakwaan, dan kepercayaannya terhadap Tuhan. Agama tidak mementingkan kepentingan pribadi dan tidak membedakan golongan politik. Hal itu karena agama berorientasi pada kepentingan abadi untuk keselamatan dunia dan akhirat, bukan persoalan kekuasaan yang bersifat sesaat. Apabila agama dieksploitasi dalam kepentingan politik dengan menggunakan simbol-simbol agama dan ajarannya, tentu ini akan melecehkan agama dan menimbulkan perpecahan. Namun, jika politik diperjuangkan dalam kepentingan agama, mungkin tidak akan menjadi masalah. Coba melihat sejarah di dunia Barat yang pernah kejadian mengenai dominasi agama Nasrani di segala aspek kehidupan. Dampaknya, acapkali dogma-dogma gereja di agama Nasrani sering dijadikan sebagai alat legitimasi dalam meraup suara mayoritas untuk kepentingan politik sesaat.

Jika hal tersebut tidak ingin terjadi, maka perlu dipahami oleh masyarakat dalam konteks itu bahwa Imam al-Ghazali pernah mengatakan perihal kategori ulama yang mengeksploitasi agama pada kepentingan

dunianya sebagai seorang ulama, yaitu menjual ayat Al-Qur'an dengan murah, mencari sumber legitimasi ayat dengan murah yang berasal dari ajaran agama guna memenuhi hasrat keduniaannya. Umat Islam dituntut untuk menjunjung tinggi toleransi dalam beragama dan menghormati pemeluk agama lain dengan tidak menghina dan mengganggu. Ayat Al-Qur'an mengajak manusia untuk percaya pada keseimbangan antara iman dan hal lainnya yang berprinsip menjaga nilai-nilai kemanusiaan, ketertiban umum, dan kesepakatan bersama (Reza, 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika politisasi tidak ingin terjadi, perlu memberikan pemahaman kepada umat Islam untuk menjunjung tinggi toleransi dalam beragama, menghormati pemeluk agama lain dengan tidak menghina dan mengganggu, serta tidak mengeksploitasi agama untuk kepentingan politiknya. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa melalui teori *double movement* Fazlur Rahman yang dikenal dengan gerakan gandanya, penegasan dari sosio-historis harus dikaji seiring masih terjadinya penghinaan suatu kelompok yang akhirnya mengakibatkan perpecahan antargolongan. Tentu ini harus kembali kepada sosio-historis awal ayat Al-Qur'an diturunkan yang menjunjung tinggi keadilan. Kedua ayat di atas dalam pembahasan, memberikan perintah kepada manusia agar tidak menimbulkan ujaran kebencian terhadap orang lain. Berbicara politisasi agama, hal ini harus dihindarkan oleh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi politik yang mengatasnamakan agama. Dampak dari politisasi agama ini akan memunculkan kesenjangan sosial dan politik. Apalagi di media sosial yang rawan terkena informasi yang belum jelas tujuan inti yang dimaksud. Masyarakat harus pintar-pintar dalam memilih informasi dengan tepat dan perbanyak literatur politik agama yang memadai. Secara teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai kajian awal tentang refleksi Pemilu 2024 terhadap politisasi agama di media sosial perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini memiliki keterbatasan tanpa melakukan riset di lapangan melalui wawancara kepada beberapa *stakeholder* terkait politisasi agama di media sosial. Penelitian ini merekomendasikan kepada instansi pemerintahan, tokoh agama, dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi politik yang mengatasnamakan agama.



Daftar Pustaka

- Adon, M. J. (2022). Menumbuhkan Semangat Pancasila Sebagai Dasar Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Sebagai Upaya Melawan Gerakan Populisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial*, 4(1), 57-58.
- Ain. (2020). *Riset UIN: Semua Parpol Mainkan Narasi Keagamaan di Medsos*. Cnnindonesia.Com.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201117171143-32-570956/riset-uin-semua-parpol-mainkan-narasi-keagamaan-di-medsos>
- Ayuningtyas, R. (2018). *Mengulik Kembali Perjalanan Kasus Ahok*. Liputan6.Com.
<https://www.liputan6.com/news/read/3322122/mengulik-kembali-perjalanan-kasus-ahok>
- Baihaki, E. (2022). *Mewaspada Politisasi Agama Menjelang 2024*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/09/06300011/mewaspada-politisasi-agama-menjelang-2024>
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Digarizki, I. (2021). Ayat-Ayat Perdamaian Dalam Tafsir Al-Azhar Perspektif Teori Double Movement fazlur Rahman. *Raushan Fikr*, 10(1), 177-122.
- Gayati, M. D. (2022). *Jokowi Ingatkan Bahaya Isu Politik Identitas dari Media Sosial*. Antaranews.Com.
<https://www.antaranews.com/berita/3310302/jokowi-ingatkan-bahaya-isu-politik-identitas-dari-media-sosial>
- Juwantara, R. A., Aini, R. P. N., & Zahra, D. N. (2020). Tafsir Al-Qur'an di Medsos: Nadirsyah Hosen's Resistance to the Politicization of the Quran in Indonesian Social Media. *Ulul Albab*, 21(2), 312-336.
- Kuwado, F. J., & Farisa, F. C. (2018). *Jokowi Resmi Tunjuk Ma'ruf Amin sebagai Cawapres*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/09/18260341/jokowi-resmi-tunjuk-maruf-amin-sebagai-cawapres>
- Malik, A., & Batubara, A. (2014). Komodifikasi Agama dalam Ruang Politik di Seberang Kota Jambi. *Kontekstualita*, 29(2), 99-114.
- Nurhayati, I. (2020). Masyarakat Multikultural: Konsep, Ciri dan Faktor Pembentuknya. *Akademika*, 14(1), 20.
- Oktaviani, G. (2022). *PBNU Tegas Larang Poltik Identitas, Gus Yahya: Jangan*



- Ciptakan Permusuhan.* Tempo.Co.
<https://nasional.tempo.co/read/1631812/pbnu-tegas-larang-politik-identitas-gus-yahya-jangan-ciptakan-permusuhan>
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Reza, M. D. (2022). Prohibition of Hate Speech in The Qur'an and Its Relationship with The Religious Moderation. *Jurnal At-Tibyan*, 7(1), 156-170.
- Ronaldo, R. (2021). Politisasi Agama dan Politik Kebencian pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(1), 35.
- Setiawan, E. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Kbbi.Web.Id.
<https://kbbi.web.id/refleksi>
- Simarmata, H. D. (2018). Pendidikan Karakter melalui Metode Refleksi. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 31, 75.
- Sujito, A. (2022). Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. *Pancasila*, 3(2), 13-32.
- Syauqi, M. L. (2022). Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, 18(2), 198-215.
- TB, A. (2023). *Tahapan Pemilu 2024 Lengkap Komisi Pemilihan Umum*. Tenggulangbaru.Id.
<https://tenggulangbaru.id/artikel/2023/1/18/tahapan-pemilu-2024-lengkap-komisi-pemilihan-umum>
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Waid, A. (2014). *Stop Politisasi Agama*. Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2014/06/13/0852289/Stop.Politisasi.Agama>
- Yuliani, A. (2017). *Ini Penyebab Maraknya Politik SARA*. Kominfo.Co.Id.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/12213/ini-penyebab-maraknya-politik-sara/0/sorotan_media